

UPAYA MENGATASI KETIDAKSETARAAN GENDER SEBAGAI AKIBAT DARI BUDAYA PATRIARKI DI JEPANG

Patricia Mahakurnia P.R Soghe, Tamiko A.E Pangau

Universitas Kristen Indonesia

E-mail : citrasoghe20@gmail.com, tamiko.tp02@gmail.com

Kata Kunci

patriarki; jepang;
program fathering

Abstrak

Ketidaksetaraan gender di Jepang sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki yang hadir pada masyarakat Jepang. Di mana laki-laki disebutkan lebih memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai bentuk ketimpangan atas hak-hak perempuan dalam lingkup keluarga dan pekerjaan. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana budaya patriarki yang mengakar tersebut mengakibatkan hadirnya berbagai kritik internasional yang juga akhirnya mendorong respon pemerintah Jepang akan ketidaksetaraan gender yang terjadi. Penelitian akan menggunakan pemahaman Feminisme Liberal dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini juga akan menjelaskan upaya-upaya NPO Fathering Japan sebagai salah satu mengurangi bentuk budaya patriarki di Jepang. Kesimpulan yang didapat adalah melalui diskursus ini diharapkan proyek Ikumen Jepang dapat menjadi “imajinasi” Ideal untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan gender dalam kehidupan modern Jepang saat ini. “Pahlawan kerah putih” yang menjadi julukan bagi kaum laki-laki Jepang yang diberikan demi kenaikan laju ekonomi negara tersebut justru membuat mereka menjadi kaum tereliminasi di keseharian mereka sendiri. Upaya untuk meraih kesetaraan gender yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan di Jepang dapat menjadi suatu diskursus baru (alternatif) mengingat bahwa peran laki-laki dan perempuan di Jepang sangat penting untuk laju pertumbuhan ekonomi mereka, karena merekalah jantung penggerakannya yang akan menentukan situasi ekonomi Jepang hari ini dan kedepannya

Keywords

patriarchy; japan; fathering
program

Abstract

Gender inequality in Japan is strongly influenced by the patriarchal culture that exists in Japanese society. Where men are said to have a higher position than women. This is evidenced by various forms of inequality in women's rights in the family and work spheres. This research will explain how this deep-rooted patriarchal culture resulted in various international criticisms which ultimately prompted the Japanese government's response to the gender inequality that occurred. The research will use an understanding of Liberal Feminism with qualitative research methods. This research will also explain the efforts of NPO Fathering Japan as one way of reducing

forms of patriarchal culture in Japan. The conclusion obtained is that through this discourse, it is hoped that the Japanese Curriculum project can become an ideal "imagination" to solve the problem of gender inequality in modern Japanese life today. The "white-collar heroes" that Japanese men have nicknamed for the country's economic upward rate have actually made them eliminated in their own daily lives. Efforts to achieve gender equality carried out by men and women in various aspects of life in Japan can be a new (alternative) discursion considering that the role of men and women in Japan is very important for the rate of their economic growth, because they are the driving heart that will determine Japan's economic situation today and in the future.

*Correspondence Author: Patricia Mahakurnia P.R Soghe
Email: citrasoghe20@gmail.com



PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas terkait isu gender di Jepang dan ingin mengkaji bagaimana negara tersebut mengatasi permasalahan terkait isu Gender. Sebagai salah satu pemenuhan dari tujuan goal yaitu tujuan ke-lima tentang *Gender Equality* yang menjadi peluang tercapainya SDGs 2030 (Astrianti & Jayanti, 2018). Masalah Pengarusutamaan gender di Jepang dinilai penting karena melihat negara Jepang sebagai salah satu negara maju di kawasan Asia, penulis ingin mengkaji bagaimana negara Jepang dalam mengatasi isu gender dengan menggunakan kebijakan maupun agenda dari pemerintah agar bisa diterapkan kepada negara lain terlebih di Kawasan Asia Pasifik. Hasil dari penelitian ini pada akhirnya akan dijadikan sebagai kontribusi dalam ilmu Hubungan Internasional untuk dijadikan sebagai sarana dalam mencari informasi terkait masalah gender di Jepang (Hadiwinata, 2017).

Jepang memiliki wilayah yang terletak di kawasan Asia Timur dan menjadi negara yang dominan dalam hal modernisasi baik dalam aspek kekuatan ekonomi maupun kehidupan sosial di kawasan tersebut. Masyarakat dengan budaya yang beragam serta nilai leluhur yang masih dipertahankan dari masa ke masa hingga masa modern membuat Jepang menjadi salah satu negara yang sangat menarik untuk dibahas. Kemampuan untuk bangkit dari kehancuran atau kekalahan di masa Perang Dunia II membuat Jepang di kategorikan sebagai negara maju pada saat ini dan menjadikannya sebagai aktor hubungan internasional yang memiliki ciri khas tersendiri (Ilya, 2015).

Jepang adalah salah satu negara yang telah mengadopsi agenda pembangunan berkelanjutan 2030 atau SDG (*Sustainability Development Goals*) dengan membangun kantor Pusat Promosi SDG untuk mencapai keseimbangan dalam pembangunan negara sambil melindungi bumi dan menghilangkan kemiskinan (Karim, 2014). *Gender equality* merupakan target pembangunan dalam SDGs yang terdapat pada poin lima. Peningkatan lansia dan penurunan angka kelahiran mendorong Pemerintah Jepang untuk mengambil inisiatif untuk meningkatkan peran perempuan di masyarakat. Namun, peringkat kesetaraan gender di Jepang berada di peringkat rendah secara global (Indun, Dheandra, & Septa, 2019).

Peringkat kesetaraan gender di Jepang menempati peringkat ke-121 sangat rendah, sebagai bandingan lebih rendah daripada negara kita Indonesia yang menempati peringkat 85. Jepang sebagai negara yang berkontribusi dalam SDGs harus mewujudkan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan di mana peringkat kesetaraan (World Economic Forum 2020).

Kebijakan kesetaraan gender tidak lepas dari krisis ekonomi Jepang. Krisis ekonomi Jepang pada 1990an menyebabkan Jepang mengalami resesi ekonomi berkepanjangan dan terjadinya gelembung ekonomi yang berakhir pada tahun 1996. Kemudian krisis keuangan

muncul kembali di tahun 1998 (Nanto, 2009) setelah itu Jepang terkena dampak dari krisis keuangan global pada tahun 2008-2009 (Kawai & Takagi, 2009, hal. 1).

Kaum perempuan Jepang sebenarnya memiliki ruang pergerakan dalam mencapai hak-hak keadilan seiring dengan berjalanya arus globalisasi yang seharusnya memberikan tempat terhadap kaum perempuan untuk berperan penting secara aktif dan produktif (Ariefa, 2020). Namun, patriarki atau nilai-nilai budaya konvensional tradisional masyarakat Jepang menjadi hambatan utama bagi arus modernisasi karena dipandang telah mengikis nilai-nilai tradisional tersebut. Rasionalitas yang dibawa oleh modernisasi mengakibatkan munculnya fenomena kelompok perempuan yang memprotes budaya patriarki Jepang dan sejak itu dipandang sebagai bentuk penindasan terhadap kelompok perempuan Jepang (Adharani & Pasaribu, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Sukidin, 2002), metode penelitian kualitatif merupakan upata untuk menganalisis berbagai keunikan yang hadir pada individu, kelompok, masyarakat maupun organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian, biasanya diperoleh dari pihak lain atau dokumen-dokumen yang sudah ada. Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam proses penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, jurnal, dokumen-dokumen resmi, serta berita dari media internet. Peneliti melakukan pencarian dan penelaahan terhadap data-data yang telah diterima yang relevan sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya Patriarki di Jepang

Jepang menjadi negara dengan tingkat kemajuan ekonomi yang tinggi, hal ini karena mayoritas Masyarakat Jepang memiliki semangat dalam bekerja dengan tingkat yang disiplin. Dengan kedisiplinan yang dimiliki oleh negara Jepang membuat negara ini menjadi semakin maju di dunia dengan produk industri rancangan milik mereka. Berbagai kelebihan yang dimiliki oleh Jepang tidak menutup kemungkinan negara tersebut memiliki masalah dan isu sosial yang terjadi dalam negara tersebut. Jepang yang menjadi negara dengan kaya akan budaya dan menjadi inspirasi bagi negara lain, memiliki permasalahan yang berkaitan dengan kesetaraan gender (MIZHARI, 2018).

Kondisi kesenjangan antara laki-laki dan Perempuan di Jepang dinilai memiliki presentase yang cukup tinggi dilihat dari aspek rumah tangga. Adanya faktor budaya dari Jepang menyebabkan timbulnya patriarki antara kaum laki-laki dan Perempuan. Penerapan dari adanya budaya patriarki ini dinilai lebih berpihak kepada kaum laki-laki yang memiliki tingkat dan kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan Perempuan (Nasrullah, 2021). Sebagai contoh, banyak pria di Jepang yang tidak peduli terhadap rumah tangga, anak dan keluarga dan mementingkan pekerjaan. Hal ini menjadikan Jepang menjadi salah satu negara di Asia dengan tingkat kesetaraan gender tinggi yang membuat ini menjadi titik lemah bagi negara Jepang (Repeta, 2009).

Secara hatafiah, patriarki adalah perilaku yang lebih mengutamakan peran laki-laki daripada perempuan di situasi dalam suatu kelompok Masyarakat. Budaya patriarki di Jepang menandakan adanya perbedaan antar laki-laki dan perempuan di mana laki-laki memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Pada awalnya, pada era sejarah Jepang kuno terdapat pandangan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang setara dalam hal kepemimpinan. Di mana Jepang hingga awal periode Muromachi pernah dipimpin oleh seorang kaisar perempuan. Terdapat juga kepercayaan atas pemujaan Amaterasi yang merupakan kepercayaan Jepang kuno terhadap dewa matahari yang berjenis kelamin Perempuan. Hal tersebut membawa pandangan bahwa kaum perempuan diyakini memiliki kekuatan supranatural khusus

dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Masyarakat Jepang menganut keyakinan ini hingga awal periode tersebut yang dikenal dengan masyarakat matriarkal (Rudiono, 2020).

Pada era Meiji, posisi kedudukan perempuan mengalami perubahan dimana hal tersebut terlihat dari posisi keduanya dalam keluarga. Anak laki-laki tertua dipercaya untuk meneruskan warisan yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya, dalam artian bahwa selain daripada anak laki-laki tertua, termasuk istri tidak mempunyai kewenangan secara hukum (Sari & Pattipeilohy, 2020). Selain itu, seorang istri juga tidak memiliki wewenang dalam perilaku suami pada kehidupan berumah tangga, sehingga sangat mungkin seorang suami dapat bertindak secara leluasa mencari kesenangan dengan wanita lain tanpa persetujuan istri sah. Hal ini kemudian menjadi awal titik awal terkait rendahnya posisi kaum perempuan dalam tatanan sosial (Santosa, 2018).

Budaya patriarki di Jepang sejatinya sudah dimulai dari ruang lingkup paling sederhana yaitu lingkungan keluarga, Perempuan dilihat secara konservatif dengan dibebankan pada tanggung jawab dalam mengurus urusan rumah tangga yang tidak dipandang sebagai pekerjaan domestik yang bisa dipertanggungjawabkan oleh pria juga. Hal ini menyebabkan banyak keluhan yang diungkapkan oleh Perempuan baik secara fisik maupun mental. Adanya patriarki yang menuntut kesempurnaan bagi seorang Perempuan untuk sempurna dalam menjalankan perannya sebagai istri dan ibu dalam keluarga. Semakin mengingkatnya budaya patriarki semakin membuat kedudukan Perempuan dinilai rendah, nilai-nilai budaya yang dimiliki Jepang bertahan hingga masuknya gerakan feminisme yang menjadi awal dan respon balik terhadap adanya patriarki di Jepang.

Jepang merupakan sebuah negara yang masih sangat erat memegang budaya patriarkinya, hal tersebut terbukti dengan data-data yang menunjukkan tingginya angka kesenjangan gender di negara ini. Menurut laporan Global Gender Gap tahun 2008, Jepang berada di urutan 98 dari 130 negara, angka tersebut jelas bahwa nilai-nilai kesetaraan gender belum sepenuhnya terwujud. 17 Dalam hal ini, Jepang menempati posisi ke 98 secara keseluruhan, dengan lebih rincinya yakni, Jepang menempati urutan 102 dalam *Economic Participation and Opportunity*, urutan 82 dalam *Educational Attainment*, dan urutan 107 dalam *Political Empowerment*. 18 Pada tahun 2008, kaum perempuan di Jepang hanya 9,4 persen yang menempati kursi parlemen, 10,8 di perusahaan perusahaan swasta Jepang, dan yang lebih memprihatinkan ialah pada lingkup Sains dan Teknologi, terutama di lingkup Universitas baik lingkup dosen ataupun mahasiswa. (9 Tomoko Otake, 2008) *The Japan Times*. From: <https://www.japantimes.co.jp/life/2008/02/24/lifestyle/japans-gender-inequalityputs-it-to-shame-in-world-rankings/#.Xr0AifIzbIU>. (18/3/23, pukul 21:10 WIB).

Kritik Dunia Internasional terhadap Budaya Patriarki di Jepang

Kesenjangan gender yang signifikan membuat banyaknya kritikan-kritikan secara internasional, beberapa diantaranya, yaitu:

CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)

CEDAW merupakan kesepakatan hak asasi internasional yang secara khusus mengatur tentang berbagai macam hak-hak perempuan dan merupakan suatu konvensi komite yang dibentuk melalui perjanjian Internasional oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) pada tahun 1979. CEDAW memberikan kritik terhadap Jepang terkait upaya dalam mengatasi ketidaksetaraan gender di negara tersebut. CEDAW menyatakan bahwa pemerintah Jepang tidak memiliki langkah-langkah konkrit untuk mempercepat tercapainya kesetaraan gender serta meningkatkan pencapaian hak-hak bagi kaum perempuan, khususnya hak-hak kesetaraan perempuan di tempat kerja, kehidupan publik dan politik. CEDAW mendorong pemerintah membuat kebijakan dengan menggunakan mekanisme peningkatan fasilitas dan kesadaran pendidikan tentang pembagian tugas dalam pengasuhan anak sebagai upaya menyeimbangkan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga dan pekerjaan.

United Nations Human Rights Committee (HRC)

Menurut Dewan HAM PBB, Jepang dinilai gagal dalam mengatasi beberapa masalah hak asasi yang telah berlangsung lama. Dewan HAM PBB melakukan pengamatan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan adanya tindakan diskriminatif terhadap kaum perempuan, perlakuan buruk terhadap tahanan, kurangnya penuntutan terhadap pelaku kejahatan yang terjebak pada kasus perdagangan manusia (Repeta, 2009:1).

Lebih lanjut, HRC juga sangat memperhatikan berbagai kasus kekerasan pada kaum perempuan, salah satunya ialah kasus pemerkosaan. HRC sangat prihatin dengan definisi pemerkosaan dalam hukum domestik Jepang yang hanya mencakup secara umum hubungan antara kaum pria dan perempuan saja. HRC kemudian merekomendasikan bahwa Jepang harus lebih memperhatikan definisi pemerkosaan dengan cara memperluas definisi dan memastikan pelecehan seksual selain dari hubungan seksual yang sebenarnya, pemerkosaan oleh kaum laki-laki dan perkosaan dalam perkawinan dianggap tetap sebagai pelanggaran pidana yang serius.

Respon Pemerintah Terhadap Ketidaksetaraan Gender Di Jepang

Kurangnya penanganan terhadap ketidaksetaraan gender di Jepang sebagai faktor dari budaya patriarki yang sudah mandarah daging bagi mayoritas rakyat Jepang disebabkan oleh minimnya pemahaman dan komitmen dari pihak berwenang dan pemerintah. Perdana Menteri Shinzo Abe berpidato dalam Pertemuan Pimpinan Global tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada 27 September 2015 bahwa pilar fundamental kebijakannya adalah terwujudnya masyarakat di mana perempuan dapat bersinar. Oleh karena itu, Jepang akan berupaya memberlakukan undang-undang baru untuk mempromosikan keterlibatan aktif perempuan dalam masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang biasa bagi laki-laki dan perempuan untuk mempromosikan keterlibatan aktif perempuan dalam masyarakat. Menciptakan masyarakat yang biasa bagi laki-laki dan perempuan untuk berbagi tanggung jawab atas pekerjaan mencari nafkah, pekerjaan rumah tangga, dan mengasuh anak diikuti mengatasi tantangan yang terkait masyarakat yang menua dan tingkat kelahiran yang rendah dibandingkan negara-negara lain di dunia dengan tetap menjalankan komitmen mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Target SDG's 2030, Pemerintah Jepang akan berkontribusi dalam menciptakan dunia di mana kesetaraan gender dan partisipasi perempuan menjadi standar, dan baik laki-laki maupun perempuan bersinar secara alami dan setara.

Perempuan Jepang hari ini dianggap telah mencapai perkembangan yang luar biasa. Modernisasi dianggap telah berhasil membawa perubahan signifikan pada level pendidikan untuk perempuan Jepang. Saat ini perempuan Jepang dianggap lebih senang untuk mengejar pendidikan di Universitas dengan persentase yang lebih tinggi angkanya ketimbang laki-laki, yaitu 59% untuk perempuan dan 52% untuk laki-laki. Meskipun begitu, permasalahan ketidaksetaraan gender masih banyak terjadi di Jepang. Menurut penelitian angka ketidaksetaraan tersebut terus meningkat dari 15% terus meningkat menjadi 40% yang ditandai dengan kesulitan perempuan-perempuan Jepang untuk bisa memperoleh posisi berpengaruh atau level atas di dalam suatu organisasi atau perusahaan (OECD, 2007).

Sebagai respon terkait persoalan ketimpangan gender tersebut, pemerintah Jepang membuat berbagai kebijakan. Berikut adalah 15 prioritas kebijakan pemerintah Jepang yang mengatur terkait persoalan gender yang dilihat dari hasil implementasi deklarasi Beijing (2000):

Isi dari deklarasi Beijing tersebut yaitu: “15 Priority Fields in the Basic Plan (those with a star were newly set) (i) Expansion of women's participation in policy decision-making processes; (ii) Reconsideration of social systems and practices and raise awareness from a gender-equal perspective (iii) Gender equality for men and children; (iv) Securing of equal opportunities and treatment between men and women in employment; (v) Men's and women's work-life balance; (vi) Promotion of gender equality aimed at bringing about vibrant agricultural, forestry, and fisheries communities; (vii) Support for men and women facing living difficulties such as poverty; (viii) Creation of an environment in which people such as the elderly, the disabled, and non-Japanese people can live comfortably; (ix) Elimination of all forms of violence against women; (x) Support for women's lifelong health; (xi) Enhancement of education and learning to promote gender equality and to facilitate diversity of choice; (xii) Gender equality in science and

technology and academic fields; (xiii) Promotion of gender equality in the media; (xiv) Promotion of gender equality in the area of regional development, disaster prevention, environment, and others; (xv) Respect for international regulations and contributions to the "Equality, Development and Peace" of the global community."

Jepang telah mengupayakan terciptanya kesetaraan gender di Jepang, yang tentunya diharapkan dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan tersebut tidak hanya untuk kepentingan kelompok baik laki-laki atau perempuan saja, namun juga mengupayakan terciptanya kondisi yang setara dan dapat bersinergi dengan kondisi perekonomian Jepang saat ini, yang tentu membutuhkan kontribusi Kerjasama baik dari laki-laki dan perempuan secara umum. Namun, tentunya implementasi tersebut masih sulit diukur keberhasilannya saat ini melihat budaya patriarki yang sudah melekat dalam masyarakat Jepang.

Upaya NPO Fathering Jepang (Ikumen) Mengatasi Ketidaksetaraan Gender di Jepang

Fathering Japan adalah sebuah Non-Profit Organization (NPO) yang berdiri pada tanggal 27 November 2006, kemudian bergabung dengan NPO korporasi di Tokyo pada 13 Desember 2006, dan sertifikasi untuk pertama kali di Tokyo pada 29 Maret 2007. Fathering Japan memiliki beberapa cabang di beberapa tempat di Jepang, diantaranya FJ (Fathering Japan) Kyushu, FJ Kansai, FJ Tokai, FJ Chugoku, FJ Tohoku, FJ Hokkaido, FJ Chiba, FJ Shiga, FJ Niigata, FJ Bunkyo ku, FJ Oedo dan FJ Pelajar. Organisasi yang bermarkas di Tokyo tersebut saat ini beranggotakan lebih dari 400 orang. Tetsuya Ando sendiri merupakan pendiri dari organisasi atau komunitas ayah paling terkemuka di Jepang tersebut. Kehadiran NPO Fathering tidak lepas dari pengalaman-pengalaman Tetsuyo Ando, sang pendiri.

Fathering Japan sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan ayah tentang urusan rumah tangga, khususnya pengasuhan anak. Kesadaran ini akan mampu melepaskan ayah dari tekanan pekerjaan, sehingga dapat mengambil peran dalam urusan keluarga, dan peran ayah diharapkan dapat membantu menghadapi berbagai permasalahan seperti menurunnya angka kelahiran, munculnya keresahan sosial dan banyaknya kejahatan terkait kasus seputar anak-anak dan perempuan (Tujuan NPO Fathering Japan, <http://fathering.jp/about>).

Program "Mothering"

Budaya patriarki membentuk diskriminasi antar kaum laki-laki dan perempuan, di mana dalam lingkup keluarga, perempuan tidak banyak memiliki hak waris dan dalam lingkup pekerjaan, upah atau gaji perempuan jauh berada dibawah kaum laki-laki meskipun bekerja di ranah pekerjaan yang sama. Selain itu, kaum perempuan dituntut harus memiliki posisi lebih khusus dalam mengasuh anak, seorang ibu harus menjadi pemain utama dalam setiap pekerjaan rumah tangga.

Program "Mothering" hadir bertujuan untuk lebih meningkatkan kedekatan terhadap kaum perempuan, mengurangi beban, dan pemberdayaan, khususnya bagi para ibu. Program ini dilaksanakan oleh anggota-anggota perempuan yang bergerak pada organisasi Fathering Japan dengan cara menyelenggarakan sosialisasi, seminar dan pembinaan terhadap para ibu. Cara-cara tersebut mengarah pada suatu harapan dimana program ini dapat meningkatkan upaya-upaya dalam pengasuhan anak yang efektif dan kesadaran kerja (karir) serta lingkungan bagi perempuan dengan anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan sosial (9 Project Mothering, <http://fathering.jp/project/mothering>).

Program Proyek Reproduksi

Pemerintah dinilai kurang memperhatikan angka, jumlah, waktu dan jarak kelahiran, yang di mana seharusnya setiap pasangan berhak mengakses informasi dan fasilitas terkait kesehatan, hak seksual, dan produksi (SRHR). Kesehatan reproduksi ditinjau dari seluruh aspek sistem reproduksi manusia, fungsi dan prosesnya, tidak hanya berupa penyakit dan kelainannya saja, tetapi juga keadaan fisik, mental dan sosialnya harus terpaut baik. Kegiatan program ini meliputi kegiatan diskusi publik atau seminar yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pendidikan seks, juga mencakup diskusi tentang bagaimana menjadi ayah yang baik serta seperti program yang bertujuan untuk mengobati infertilitas.

Program ini sangat didukung oleh semua kalangan, khususnya kaum laki-laki, mereka memiliki intensitas tinggi dan aktif dalam berkomitmen menjadikan SRHR sebagai instrument

langkah konkrit dalam menyelesaikan permasalahan gender. Selain itu, sosialisasi kehidupan keluarga berencana, hubungan perkawinan, serta pendidikan seks untuk generasi penerus terus dilakukan. Melalui program ini *Fathering Japan* menunjukkan bahwa sosok ayah sebagai kepala keluarga tidak dinilai hanya dari persoalan ekonomi saja, namun juga sosok yang dapat menjadi pilar mental bagi keluarganya dan menjaga sekaligus menjadi pelindung posisi perempuan dan anak-anak di dalam keluarganya masing-masing.

Program Sanky Papa

Jepang merupakan salah satu negara dengan ekonomi terkuat di benua Asia, hal tersebut berkaitan dengan prinsip totalitas kerja dan memiliki jam kerja yang panjang disetiap harinya oleh masyarakat Jepang. Program Sanky Papa adalah suatu program yang mendorong kaum laki-laki terkhusus para ayah untuk dapat melaksanakan program pengasuhan anak, kegiatan ini dilakukan dalam waktu ketika mengambil cuti pekerjaan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran para ayah akan pentingnya merawat anak-anak mereka dan menerapkan gaya hidup untuk menyeimbangkan waktu kerja dan pengasuhan anak agar generasi mendatang dapat memahami pentingnya peran ayah dalam kehidupan berkeluarga, termasuk mengasuh anak (*Fathering Japan*, Sanky Papa, From : <https://www.fathering-japan-thankyouppapa.com/>).

Fathering Japan berupaya meningkatkan kesadaran kaum pria tentang urusan keluarga sehingga nantinya dapat meringankan tekanan perempuan dalam menjadi ibu dan bagaimana beratnya mengurus rumah tangga seorang diri. Terdapat 3 misi dalam program ini, diantaranya:

1. Meningkatkan jumlah kaum pria yang mengambil cuti pengasuhan anak dalam waktu 8 minggu setelah ibu melahirkan.
2. Membangun konektivitas antar kaum pria selama masa pengambilan cuti.

Mempromosikan cuti pengasuhan anak kepada masyarakat, lembaga pekerjaan dan melakukan pendampingan untuk reformasi struktur sosial

KESIMPULAN

Upaya Jepang dalam menanamkan pemahaman mengenai gender kepada setiap kalangan masyarakatnya ternyata bukanlah hal yang mudah, berbagai usaha telah dilakukan untuk memberikan kesadaran akan ketimpangan gender, tetapi hal tersebut masih terhalang oleh budaya patriarki yang telah mengakar dalam budaya Jepang sehingga rangkain perubahan dan revisi serta amandemen dalam mengatasi isu ketimpangan gender masih terus diupayakan. Adanya akar budaya patriarki yang sangat mengikat dan sudah tertanam selama berabad-abad menandakan bahwa situasi ini menjadi sulit dihadapi oleh Jepang. Hak-hak dan status kedudukan perempuan masih menjadi isu yang terus diperbincangkan.

Kemunculan gerakan feminis menimbulkan banyak pergeseran terkait dengan peran gender serta pandangan terhadap laki-laki yang memiliki gelar sebagai seorang ayah di Jepang. Ikumen sebagai wacana alternatif (*counter image*) dari dominasi atau hegemoni mitos *stereotype* gender. Melalui diskursus ini diharapkan proyek Ikumen Jepang dapat menjadi “imajinasi” Ideal untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan gender dalam kehidupan modern Jepang saat ini. “Pahlawan kerah putih” yang menjadi julukan bagi kaum laki-laki Jepang yang diberikan demi kenaikan laju ekonomi negara tersebut justru membuat mereka menjadi kaum tereliminasi di keseharian mereka sendiri. Upaya untuk meraih kesetaraan gender yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan di Jepang dapat menjadi suatu diskursus baru (alternatif) mengingat bahwa peran laki-laki dan perempuan di Jepang sangat penting untuk laju pertumbuhan ekonomi mereka, karena merekalah jantung penggerak yang akan menentukan situasi ekonomi Jepang hari ini dan kedepannya.

REFERENSI

- Adharani, Deanita, & Pasaribu, Rouli Esther. (2019). Kajian Adaptasi Film Kaguya Hime No Monogatari: Refleksi Terhadap Masyarakat Patriarki Jepang Modern. *Jurnal Seni Nasional Cikini*, 5(1), 7–21.
- Ariefa, Nina Alia. (2020). *Peran Perempuan Jepang Dalam Perspektif Gender*.
- Astrianti, Linna, & Jayanti, Sri Rahayu Nur. (2018). Feminisme Liberal Dalam Novel Nayla Karya Djenar Maesa Ayu. *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra Indonesia (Senasbasa)*, 2(2).
- Hadiwinata, Bob Sugeng. (2017). *Studi Dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, Dan Reflektif*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ilya, Aktop. (2015). *Pengaruh Budaya Patriarki Dalam Bisnis Eksploitasi Perempuan yang Dilakukan Oleh Yakuzadi Jepang*. Undip.
- Indun, Roosiani, Dheandra, Tri Safitri, & Septa, Nursetianingsih. (2019). Fenomena Ikumen Dalam Masyarakat Jepang. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Semester Genap 2018/2019*, 7(1), 25–38. Unsada.
- Karim, Abdul. (2014). Feminisme: Sebuah Model Penelitian Kualitatif. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 10(1), 83–98.
- Mizhari, Afifah Sausan. (2018). *Analisis Internalisasi Norma Kesetaraan Gender Periode 1990-2017 Di Jepang*.
- Nanto, Dick Kazuyuki. (2009). *The Global Financial Crisis: Analysis And Policy Implications*. Diane Publishing.
- Nasrullah, Intan Dwi. (2021). Pengarusutamaan Gender Di Jepang Untuk Mencapai Sdg's (Sustainable Development Goals) Dalam Perspektif Feminisme Liberal. *Journal Of Feminism And Gender Studies*, 1(2), 132–147.
- Repeta, Lawrence. (2009). Un Committee Faults Japan Human Rights Performance, Demands Progress Report On Key Issues. *The Asia-Pacific Journal*, 20.
- Rudiono, Rudiono. (2020). *Fathering Japan: Strategi Jepang Dalam Mencapai Kesetaraan Gender Sebagai Respon Terhadap Kritik Pbb*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Santosa, Oke Bobby Putra. (2018). *Representasi Perempuan Dalam Budaya Patriarki Di Jepang (Analisis Teksual Pada Film Osaka Elegy)*.
- Sari, Annisa Yuliana, & Pattipeilohy, Shary Charlotte Henriette. (2020). Ketidaksetaraan Gender Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Di Jepang. *Journal Of International Relations*, 6(2), 358–367.
- Sukidin, Basrowi. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendekia.

© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

